



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

BAMBANG WIRANTO
NIM. 11727101944

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1442 H / 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomo 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru"* yang ditulis oleh:

Nama : BAMBANG WIRANTO

NIM : 11727101944

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Zulhijah 1442
12 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi


Basir, S.H., MH.
NIK. 130 217 126

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*PELAKSANAAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NO 114 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEDUDUKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU*" yang ditulis oleh :

Nama : **BAMBANG WIRANTO**
NIM : 11727101944
Program Studi : Ilmu Hukum S1

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : ONLINE

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli., M.Ag.

Sekretaris
Basir, SHL., MH.

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH.

Penguji II
Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan mengetahui dan memahami apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Kecamatan Bina Widya.

Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik. Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum tercapai secara maksimalnya mengenai Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun faktor Penghambat yang terjadi di lapangan saat ini adalah Tingginya angka kenaikan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kesulitan untuk menempatkan pedagang berjualan. Inilah yang kemudian menghambat kinerja dalam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Drs. Jumono, Ibunda Sri Widayati, S.Pd.SD, Mbah Hj. Nganti, Mas Dodi Saputra, S.Pd dan Andi Handoko, S.Kom yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan memberikan bantuan selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir.
2. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, S.H., M.Hum serta staf jurusan Ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Basir, SHI., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Angrayni, SH., MH selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Ibu Dr. Irdha Mirdhayati, S.Pi., M.Si selaku Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah Plus yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses KKN-DR.
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru beserta jajaran yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
10. Forum Kajian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FK-MASSYA), Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPRPM), Lembaga Pengembangan Prestasi Akademik (LP2A), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Himapasbar-Riau, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Suska Riau, terimakasih telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan kepemimpinan kepada penulis.
11. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017, teman-teman lokal B Ilmu Hukum angkatan 2017, dan lokal D Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Penulis

BAMBANG WIRANTO

NIM. 11727101944



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta
milik UIN
Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	16
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	16
2. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru	18
3. Kondisi Demografis Kota Pekanbaru	19
4. Potensi Wilayah Kota Pekanbaru	20
5. Gambaran Ekonomi Kota Pekanbaru	21
B. Kecamatan Bina Widya.....	23
1. Letak Geografis	23
2. Potensi Wilayah.....	24
3. Struktur Organisasi Kecamatan Bina Widya.....	25
C. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	26
1. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi Dan Misi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	28
3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	29

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan	30
1. Pengertian Pelaksanaan	30
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan	31
3. Unsur-Unsur Pelaksanaan.....	32
B. Tinjauan Umum Pembinaan.....	32
1. Pengertian Pembinaan	32
2. Fungsi Pembinaan Hukum.....	33
3. Pembinaan Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	34
C. Pemerintah Daerah Secara Umum	34
1. Pengertian Pemerintah Daerah	34
2. Asas-Asas Pemerintah Daerah.....	40
3. Dasar Hukum Pemerintah Daerah	43
4. Fungsi Pemerintah Daerah.....	43
D. Tata Ruang Secara Umum	44
1. Pengertian Tata Ruang.....	44
2. Klasifikasi Tata Ruang	47
3. Dasar Hukum Tata Ruang	48
E. Konsep Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	50

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomo 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	53
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table I.1 Populasi dan Sampel.....	12
---------------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan harus berlandaskan pada hukum.¹ Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi negara berlandaskan akan hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang didalamnya juga mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah masyarakat juga harus bersendikan pada keadilan, dan keduanya berlum lengkap jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan.² Dalam fungsinya sebagai pengontrol masyarakat, hukum harus hadir ditengah-tengah masyarakat tersebut dengan mengadopsi nilai-nilai yang berkembang diantara masyarakat itu pula.

Demi terpenuhinya kebutuhan perekonomian yang baik ditengah masyarakat, pembangunan ekonomi lokal merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola segala sumber daya yang ada untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.³ kita mengenal istilah Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun pada kenyataannya di lapangan menjamur dan maraknya Pedagang Kaki Lima ini semakin luas terjadi.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h.53

³ Rillia Aisyah Haris, Elsy Muzayyana, Irma Irawati, *UNMER, Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Ekonomi Lokal di Kabupaten Sumenep, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol: 4, No: 2, 2019, h.140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada daerah tersebut. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berada di tingkat Kabupaten/Kota merupakan lembaga sebagai sarana tugas pembantuan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur melalui Peraturan Kepala Daerah. Untuk melakukan pembinaan sebagaimana mestinya sehingga dapat terpantau dan terorganisir dengan baik terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada dilingkup daerahnya.

Dasar-dasar kebijakan politik otonomi daerah, baik sebagai gagasan maupun secara konstitusional, otonomi merupakan salah satu sendi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

1. Dasar permusyawaratan/perwakilan. Dasar ini merupakan pengejawatahan paham kedaulatan rakyat di bidang penyelenggaraan pemerintahan (politik). Pembentukan pemerintahan daerah otonom adalah dalam rangka memberikan kesempatan rakyat setempat untuk secara lebih luas berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Dasar kesejahteraan sosial bersumber baik pada paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi meskipun paham Negara berdasarkan atas hukum atau Negara kesejahteraan. Kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan pemerintahan daerah yaitu pelayanan.
3. Kedudukan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara yaitu sebagai *the supreme law of the land*, bahkan sebagai *the highest authority*.⁴

⁴ Abu Samah, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Urusan pemerintahan diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁵ Namun pada saat ini, kita berada dalam sistem otonomi daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, dengan didasari oleh asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Maka oleh sebab itu, untuk mendukung kegiatan dalam hal Perdagangan dan Perindustrian maka Walikota Pekanbaru membuat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Melalui peraturan kepala daerah tersebut disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) “bahwa bidang pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar”. Lalu pada Pasal 21 ayat (1)

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.14.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di sebutkan Bidang pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga membawahi Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL, serta Seksi Retribusi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada Pasal (3) pelaksanaan pembinaan dengan melaksanakan penataan dan pemberdayaan yang meliputi:

1. Pendataan
2. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal.
3. Fasilitasi akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan
5. Pembinaan dan bimbingan teknis
6. Fasilitasi kerjasama antar daerah
7. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Keistimewaan norma hukum adalah pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman⁶. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Pasal 23 ayat (2) poin (P), “Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL menyelenggarakan fungsi sebagai Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)”. Maraknya Pedagang Kaki Lima yang menempati ruas jalan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru seakan

⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika:2014), h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan kurangnya pembinaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima. Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa Undang-undang atau aturan hukum adalah sarana pembentukan masyarakat, khususnya dalam sarana pembangunan.⁷ Sebagaimana pengamatan penulis melihat Pedagang Kaki Lima bahkan hampir menyentuh ruas jalan utama yang tentunya juga sangat membahayakan bagi pedagang dan mengganggu akses pengguna jalan. Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh daerah dan menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah pemerintahan yang perkembangannya yang sangat pesat di Provinsi Riau, dan dapat di kategorikan sebagai kota dengan perkembangan yang sangat pesat baik di bidang pembangunan infrastruktur, perdagangan, investasi, keamanan, serta pendidikan dan lain-lain. Daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan sehingga menambah daya tarik masyarakat desa untuk pindah ke kota. Perkembangan Kota Pekanbaru adalah hasil dari kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kecamatan Bina Widya yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Tampan adalah salah satu Kecamatan dengan angka Pedagang Kaki Lima yang tinggi di Kota Pekanbaru. Dengan jumlah Pedagang Kaki Lima sebanyak 565

⁷ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada:2014), h.17

orang pada tahun 2017, kemudian naik 614 dan naik menjadi 659 pada tahun 2019 dan angka ini akan terus naik seiring kondisi, dan faktor lain yang dinilai oleh masyarakat akan mendatangkan profit lebih besar.⁸ Berdasarkan pengamatan penulis sangat mudah menemui Pedagang Kaki Lima di kecamatan Bina Widya, Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan mengganggu ruang publik seperti: merusak keindahan ruang terbuka, macet, penumpukan sampah, dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Karena mereka selalu memanfaatkan tempat-tempat yang dipandang sebagai profit seperti titik keramaian atau lokasi yang ramai dikunjungi baik setiap saat ataupun secara musiman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan observasi ke lapangan untuk mengetahui langsung apakah fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam hal Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan atau belum dengan cara mewawancarai beberapa Pedagang Kaki Lima. Penulis kemudian memilih lokasi sepanjang Jalan H.R Soebrantas, memulainya dengan mewawancarai pedagang bernama Nur Elmi yang mana berdasarkan pengakuannya telah berjualan selama 3 tahun disekitaran jalan H.R Soebrantas Kecamatan Bina Widya tepatnya diarah keluar Jalan Bangau Sakti, pedagang yang menjual Es Jagung Hawai ini mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa adanya fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru, baik dalam bentuk sosialisasi atau hal lainnya, yang ia tahu hanya seringnya Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan peringatan untuk tidak berjualan di area tersebut, “tapi hanya sebatas

⁸ Jurnal JOM FISIP, *Profil Pedagang Kaki Lima Lansia di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, (Vol.4 Nomor, 2 Oktober 2017), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peringatan begitu saja, tegasnya”.⁹ Setelah itu penulis beranjak beberapa meter masih dilokasi yang sama untuk melakukan wawancara dengan para Pedagang Kaki Lima, maka penulis selanjutnya mewawancarai Pedagang bernama Emi Chaniago, yang berdasarkan pengakuannya telah berjualan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun di lokasi tersebut. Saat ditanyai pernah atau tidak mendapatkan Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, ia menjawab tidak mengerti pembinaan yang bagaimana, karena selama ini tidak pernah ada pembinaan, yang ada hanya diusir, tidak boleh berjualan, sedangkan ia mengaku hanya dengan jualan inilah dapat mencari nafkah, oleh karenanya ia tetap bertahan dilokasi tersebut dan tidak pernah mendapatkan pembinaan, “ya hanya diusir Satpol PP pernah, tapi tidak diberi lokasi baru atau diarahkan harus kemana, tambahya”.¹⁰ Lalu penulis maju lagi dari lokasi wawancara kedua, tepat di area gerbang depan Universitas Riau, penulis kembali melakukan wawancara dengan Pedagang Kaki Lima bernama Rosliana penjual dimsum ayam yang berdasarkan pengakuannya telah berjualan hampir satu tahun, sama seperti kedua Pedagang Kaki Lima sebelumnya, Rosliana juga tidak pernah tau ternyata ada fungsi Pembinaan Pedagang Kakai Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, “Jika itu benar ada, semoga kami dapat bantuan dana pinjaman, tempatnya juga disediakan, bukan digusur-gusur gitu aja oleh Satpol PP”, ungkapya.¹¹

⁹ Wawancara Nur Elmi, Pedagang Kaki Lima, Rabu 24 Februari 2021, pukul : 15.20 WIB di Pekanbaru

¹⁰ Wawancara Emi Chaniago, Pedagang Kaki Lima, 24 Februari 2021, pukul: 16.00 WIB di Pekanbaru

¹¹ Wawancara Rosliana, Pedagang Kaki Lima, 24 Februari 2021, pukul: 17.10 WIB di Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan adanya permasalahan berdasarkan pernyataan dari para Pedagang Kaki Lima yang berbenturan dengan regulasi penulis bermaksud untuk meneliti tentang **Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman yang keliru, serta untuk memberikan arahan terhadap penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam tulisan ini, yaitu khusus Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru?

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.¹² Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013), h. 109.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Untuk memahami Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Menggunakan pendekatan Pelaksanaan Hukum untuk mengetahui apakah Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Jalan Teratai Nomor 83 Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Telp: (0761) 21669, Web: <http://dagtri.pekanbaru.go.id/>, Fb: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.¹⁴

¹³ *Ibid*, h. 110

¹⁴ Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1
Populasi Dan Sampling

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang
2.	Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang
3.	Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bina Widya	368 orang	5 orang
Jumlah		370 orang	7 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Dokumentasi, yaitu merupakan pengambilan bukti-bukti dalam bentuk dokumen ataupun selama melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

F. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini, dilakukan secara sistematika yaitu membagi pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Penulis dalam skripsi ini membagi lima bab yang diuraikan seperti dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran Lokasi Penelitian, Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Visi Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, serta Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan di uraikan Teori tentang, Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah, Teori Pelaksanaan Hukum dan Teori-Teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. Meliputi Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minang Kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah Senapelan ditepi Sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minang Kabau (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari di peringati sebagai hari jadi kota ini. Berdasarkan *Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* Nomor 1 tanggal 11 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang di kepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus Land Schap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibu Kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942.¹⁵

¹⁵ Dikutip dari situs <https://www.pekanbaru.go.id/> diakses pada tanggal 22 April 2021, pukul 02.33 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan UUD No 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pekanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan UUD Darurat No 19 tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Desember No 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi Ibu Kota adalah Tanjung Pinang (Kini menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau).¹⁶

2. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut sekitar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota diperluas dari ± 62,96km² menjadi ± 446,50km² terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang

¹⁶ Sejarah Pekanbaru, Pemerintahan Kota Pekanbaru, Di akses 24 Maret 2021, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan. Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

3. Kondisi Demografis Kota Pekanbaru

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi. Perubahan dan pengembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan perekonomian. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 1.064.566 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 1.091.088 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, data jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 1.038.118 jiwa.¹⁷

¹⁷ Data Olahan Badan Pusat Statistika Kota Pekanbaru, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Potensi Wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru bahkan mampu menyokong perekonomian Riau sebesar 19,57 persen (tanpa migas), menempati urutan teratas. Dilihat dari sisi pembangunan manusia. Pekanbaru memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kategori sangat tinggi, yaitu sebesar 81,35 persen. Angka ini menempatkan Pekanbaru pada rangking teratas di Riau. Dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kategori sangat tinggi. Perekonomian Pekanbaru mampu tumbuh positif, dengan besar 6,01 persen dan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini mampu menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran.¹⁸

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan Pekanbaru mengalami penurunan yang cukup berarti, walau masih bertengger di kisaran angka 2 persen. Sampai dengan 2019 jumlah penduduk miskin tercatat 28,60 ribu orang atau 2,52 persen, di mana tahun sebelumnya pada 2018, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru sebanyak 31,62 ribu orang atau 2,85 persen.

Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan dilihat dari sisi pengangguran pun turut mampu bergerak turun. Hingga Agustus 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekanbaru tercatat 7,86 persen. Dibanding tahun sebelumnya, tingkat pengangguran 2018 sebesar 8,42 persen.

¹⁸ Sejarah Pekanbaru, Pemerintahan Kota Pekanbaru, Di akses 24 Maret 2021, h. 16

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun yang cukup mencengangkan, lebih dari separuh jumlah pengangguran ini justru didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta ditambah pula dari lulusan Universitas. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja Pekanbaru didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah sebesar 55,44 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena pengangguran terdidik, yang dapat menjadi hambatan upaya Pekanbaru untuk bersaing di kancah global pembangunan.

Gambaran kemiskinan dan pengangguran merupakan sebagian kecil persoalan yang akan dihadapi, terkait kesehatan, pendidikan serta sarana dan infrastruktur juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Walau demikian Pekanbaru tentunya terus dapat tumbuh dan melaju dengan pembangunan yang lebih baik ke depannya.

Kebijakan pemangku kepentingan tentunya sangat dinanti oleh masyarakat demi tercipta Pekanbaru yang semakin maju. Harapannya para pengambil keputusan dapat mengoptimalkan sumber-sumber potensi unggulan yang telah ada, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan potensi-potensi baru lainnya, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memungkinkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

5.1 Gambaran Ekonomi Kota Pekanbaru

Selang kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Pekanbaru didominasi 3 (tiga) sektor unggulan. Ketiga sektor ini mampu berkontribusi sebesar 80,81 persen. Secara berturut adalah, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 31,41 persen; sektor konstruksi sebesar 30,16 persen serta sektor industri pengolahan sebesar 19,24 persen. Upaya untuk mengoptimalisasi nilai tambah pada ketiga sektor unggulan, diharapkan mampu menopang laju perekonomian Pekanbaru ke depannya.

Peranan sektor perdagangan yang dominan mampu menunjang sektor terkait lainnya, termasuk sektor pariwisata yang perlu ditonjolkan. Kota Pekanbaru yang kental dengan adat melayu serta ciri khas arsitektur bangunan melayu merupakan salah satu daya tarik bagi sektor pariwisata. Sarana akomodasi yang memadai serta adanya objek-objek wisata baru yang mulai tumbuh, membuat Pekanbaru semakin dilirik sebagai kota tujuan wisata dan bisnis.¹⁹

Dengan tumbuhnya sektor pariwisata tentunya tidak menutup kemungkinan akan bermunculan serta lahirnya aktivitas terbaru yang tidak kalah bagusnya untuk menggiatkan perekonomian masyarakat. Ide kreatifitas mau tidak mau akan terasah untuk menghadirkan nuansa baru dalam perekonomian, sehingga terciptanya lapangan usaha serta kewirausahaan dari para generasi muda, seperti semakin maraknya usaha-usaha kuliner baru

¹⁹ Data Olahan Badan Pusat Statistika Kota Pekanbaru, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seiring meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya sampai disitu, sisi seni dan artistik pun turut terpancing untuk tumbuh, ditandai dengan berjamurnya usaha jasa design, videografis serta fotografi. Hal ini menandakan perlunya integrasi serta sinergi dari berbagi lini lapisan perekonomian untuk dapat menciptakan Pekanbaru yang semakin kondusif dan sejahtera. Upaya optimalisasi serta dukungan dan kerja sama yang erat antar sektor perekonomian diharapkan menjadi perwujudan visi Kota Pekanbaru, yakni **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**.

B. Kecamatan Bina Widya

1. Letak Geografis

Bina Widya adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kecamatan ini bernama Kecamatan Tampan. Namun sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan, Bina Widya menjadi Kecamatan baru. Kecamatan ini terdiri dari Kelurahan "Binawidya", Kelurahan "Delima", Kelurahan "Tobek Godang", Kelurahan "Sungai Sibam", dan Kelurahan "Simpang Baru".²⁰

Batas wilayah Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan pada Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Payung Sekaki;

²⁰ Data Kecamatan Tampan 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai;
- 3) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar;
- 4) Sebelah Selatan : Kecamatan Tuah Madani.

2. Potensi Wilayah

Memiliki pasar Simpang Baru Panam atau yang akrab disebut Pasar Selasa, Kecamatan Bina Widya menjadi Kecamatan yang memiliki Pola Perekonomian yang baik.

Masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda pemerintahan Kecamatan Bina Widya ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain: memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua se Kota Pekanbaru, Kecamatan Bina Widya dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Bina Widya. Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bina Widya.

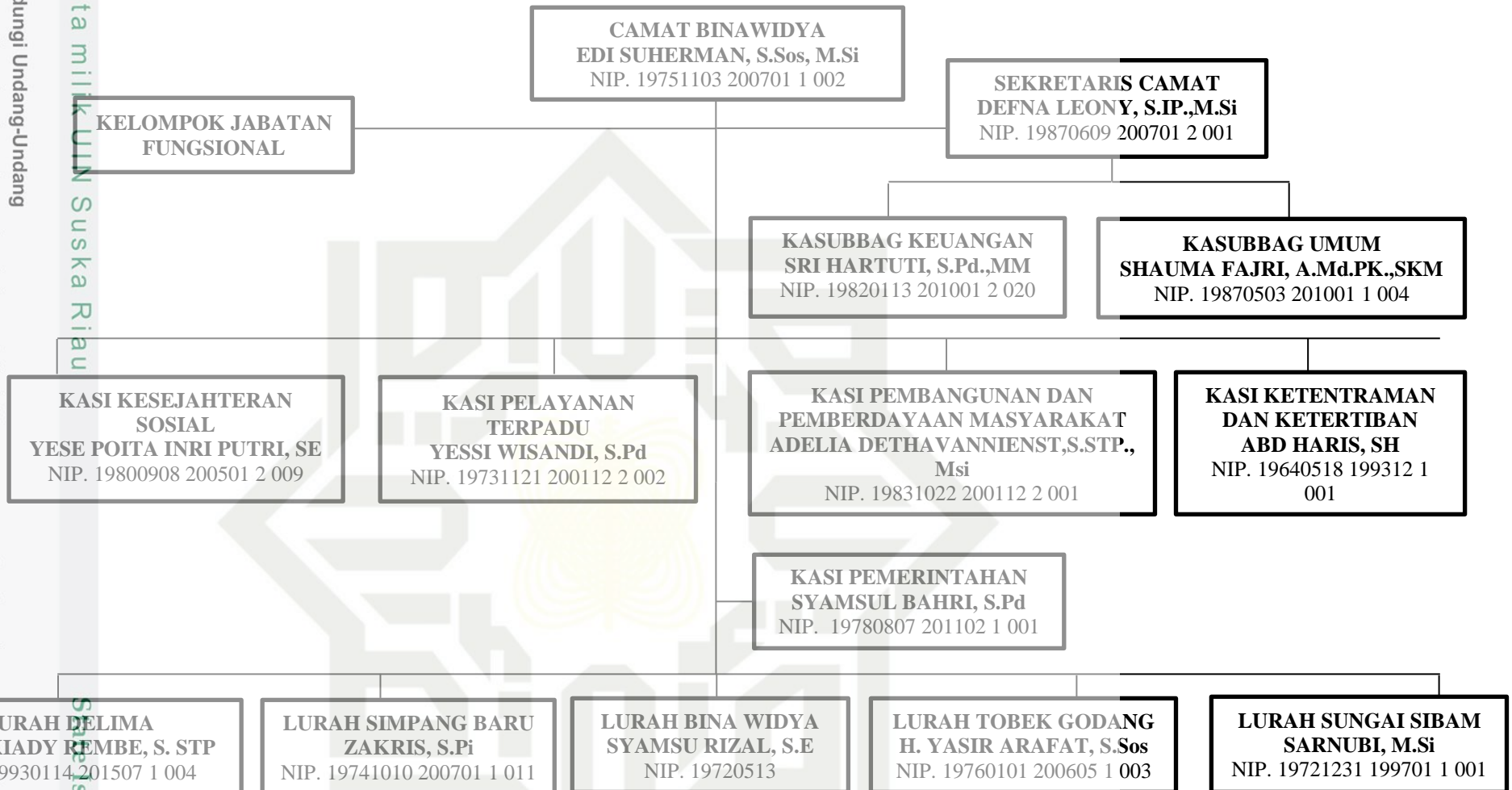
UIN SUSKA RIAU



3. Struktur Organisasi Kecamatan Bina Widya

Tabel II.1

Struktur Organisasi Kecamatan Bina Widya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Un

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan realisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah/Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Kota Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Wali Kota Pekanbaru di Pekanbaru Monor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru. Pada bagian berikutnya akan penulis jelaskan lebih detail lagi mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut.²¹

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1996 : Bergabunglah Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, dan Perdagangan Kota Madya

²¹ Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2020

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini. Tahun 2008 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Visi :

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi rakyat yang tinggal di Kota Pekanbaru.

Misi :

- 1) Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang merata.
- 2) Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- 3) Meningkatkan mutu produksi industri yang mempunyai daya saing dan bertanggungjawab.
- 4) Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme bidang industri dan perdagangan.
- 5) Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat.
- 6) Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

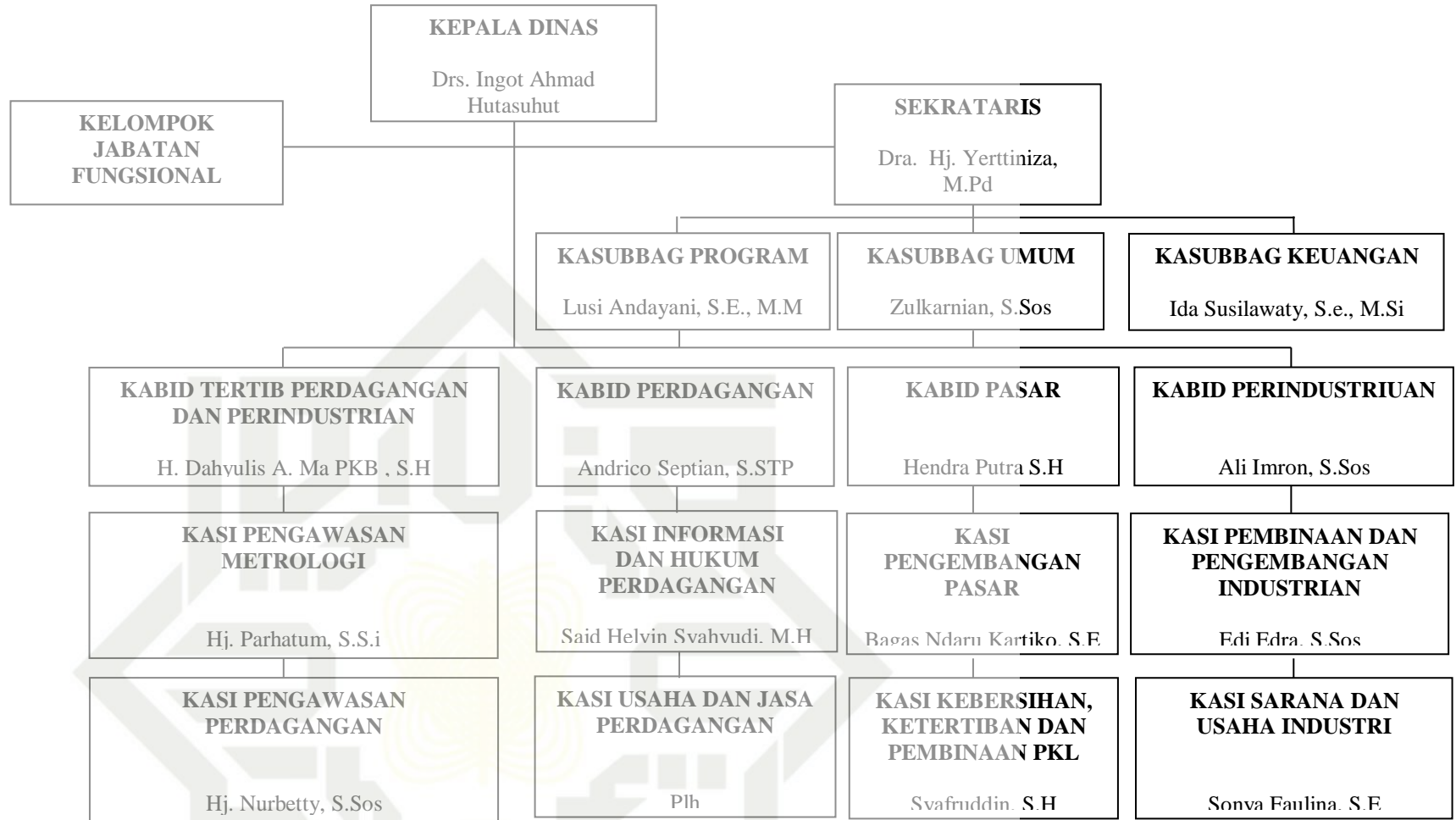


3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



State Islamic Uni



BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²²

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan

²² Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.²³

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksanaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program

²³ Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

- Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures). yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Pelaksanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁴ Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efesien.

3. Unsur-Unsur Pelaksanaan

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting yaitu :

- Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

B. Tinjauan Umum Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Menurut arti kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan berasal dari "bina" atau "membina" (kata kerja) berarti

²⁴ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun, mendirikan; mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, dan sebagainya). "Bina" (kata benda) antara lain berarti akumulasi dan akselerasi secara bertahap dalam tempo, intensitas. Pembina berarti orang yang membina, alat untuk membina, pembangun. Pembinaan berarti proses, perbuatan, cara membina (negara dan sebagainya); pembaharuan, penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan hukum berarti kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.²⁵

2. Fungsi Pembinaan Hukum

Di negara Indonesia persoalan pembinaan hukum nasional menghadapi masalah yang kompleks, karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia paling tidak di bidang hukum perdata bersifat pluralistik di mana golongan dan penduduk masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan. Hal ini juga timbul sebagai dampak dari pertentangan antara aliran positivisme hukum *c.q.* aliran legisme hukum dan mazhab sejarah hukum.

Pihak yang dapat mengungkapkan "kesadaran hukum masyarakat" atau "perasaan keadilan masyarakat" adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat di pusat dalam proses pembentukan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat di daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Yurisprudensi (dalam

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h.134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sistem/tradisi hukum Eropa Kontinental) atau Preseden (dalam sistem/tradisi hukum Anglo-Sakson/Anglo-Saksis) merupakan sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat yang penting, demikian pula pendapat para ahli/pakar hukum dalam suatu cabang ilmu hukum tertentu. Pengungkapan "kesadaran hukum masyarakat" atau "perasaan keadilan masyarakat" dapat juga dilakukan melalui penelitian hukum oleh lembaga-lembaga penelitian atau pihak lain. Anggota masyarakat biasa pun dapat menyatakan pendapatnya, karena pada akhirnya hukum dibuat untuk masyarakat²⁶.

3. Pembinaan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Pasal 23 ayat (2) poin (P) Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL menyelenggarakan fungsi sebagai Pengendalian, Pengawasan dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pendataan dan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap Pedagang Kaki Lima.

C. Pemerintahan Daerah Secara Umum

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua istilah

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bina Cipta, Bandung:1976), h. 8.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal (1) angka (1) menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah adalah aparat yang menjalankan pemeritahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.²⁷

Selain itu Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur 9 dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Perubahan ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedang Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²⁸ Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal (1) angka (5) menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor

²⁸ M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018, h.884

²⁹ M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, Nomor 4 Tahun 2018, h.884



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dasar pengaturan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal Pasal 18, 18A, dan 18B yang berbunyi:

Pasal 18:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang.

Pasal 18A:

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah besar dan kecil yang kemudian bersifat otonom, yaitu daerah yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.³⁰

Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan

³⁰ C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.³¹

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. Didalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Pembagian daerah atas daerah besar

³¹ Azlan Thamrin, *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik Hukum dan Islam, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, h.43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa". Wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah besar dan kecil yang kemudian bersifat otonom, yaitu daerah yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.³²

2. Asas-asas Pemerintah Daerah

Terdapat asas-asas dalam pemerintahan daerah, yaitu:

a. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.

b. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan

³² C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Desentralisasi menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan daerah tingkat tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah, dengan demikian tugas, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.³³ Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan

³³ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta;
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.

C. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.³⁴

3. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 18 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

³⁴ Ibid, 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

4. Fungsi Pemerintah Daerah

Pengertian fungsi yang dimaksud adalah dalam bentuk “normatif” yaitu berarti tugas atau yang berkaitan dengan jabatan publik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.³⁵ Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Fungsi

³⁵ Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012, h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

D. Tata Ruang Secara Umum

1. Pengertian Tata Ruang

Pengertian ruang menurut D.A. Tisnaatmadjaja adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”³⁶. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KOTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “wadah yang meliputi daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”.³⁷ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali sarana

³⁶ D.A Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Universitas Pajadhiyang, Bandung, Rajawali Press:2017), h. 6.

³⁷ *Ibid*, h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrol dan sebagi pengarah pembangunan. Berdasarkan aturan hukum tersebut Hukum Penataan Ruang (UUPR), pada tataran filsafat hakekatnya untuk mengendalikan ruang mulai pada tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (ontologis), adapun prosedur untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan/alam/ruang menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (epistemologis), yang memerlukan dukungan adanya kepastian hukum dalam penataan ruang (aksiologis) tapi masih belum terpenuhi. Dilihat dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ruang terbagi dalam beberapa katagori, yaitu :

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah;
- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksi.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atauruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Dimana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.³⁸

Pola pemanfaatan ruang dalam hal ini meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan. Dimana tata ruang yang dimaksud adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gua, gunung, dan lain-lain.³⁹

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana menyatakan bahwa ruang sebagai wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu kemudian negara menyelenggarakan suatu penataan ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara.

2. Klasifikasi Tata Ruang

Penataan ruang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pengertian

³⁸ *Ibid*, h.10

³⁹ Uniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, (Bandung: Nuansa, 2008), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budi daya. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang, baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Dalam rangka akan dilaksanakannya suatu aktivitas pembangunan, harus memperhatikan fungsi utama dari suatu kawasan, yang terdiri atas :

- a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Melihat fungsi utama dari kawasan lindung ini, dapat dikatakan bahwa kawasan lindung merupakan suatu wilayah yang tidak diperuntukan bagi dilaksanakannya aktivitas pembangunan;
- b. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, kawasan budi daya merupakan suatu wilayah yang memang diperuntukan bagi aktivitas pembangunan. Untuk menciptakan keteraturan dalam penataan ruang diseluruh wilayah Negara Indonesia, keberadaan fungsi kawasan tersebut perlu dituangkan secara tegas dalam perencanaan tata ruang baik yang bersifat nasional, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota. Sehingga nantinya, tata ruang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan atau usaha tertentu, yakni menempati wilayah sesuai dengan peruntukannya, disisi lain lokalisasi tersebut diharapkan dapat dengan mudah untuk

melakukan pemantauan dan pengendalian dampak dari kegiatan⁴⁰

3.2 Dasar Hukum Tata Ruang

Terkait dengan hal tersebut, dalam pengaturan penataan ruang, adanya tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijadikan sebagai dasar dalam penetapan suatu aturan hukum nasional dalam bidang penataan ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, sebagai acuan penataan ruang nasional diberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, namun kemudian diganti karena dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi dan kebutuhan penataan ruang yang ada di Indonesia. Selain itu adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam hal penataan ruang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan salah satu faktor dibuatnya peraturan penataan ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992.⁴¹

Terkait dengan hal tersebut, dalam pengaturan penataan ruang, adanya tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴⁰ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Makasar, Prenada Media:2014), h. 64

⁴¹ *Ibid*, h.66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, sebagai acuan penataan ruang nasional diberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, namun kemudian diganti karena dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi dan kebutuhan penataan ruang yang ada di Indonesia. Selain itu adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam hal penataan ruang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan salah satu faktor dibuatnya peraturan penataan ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus lebih optimal, efektif dan efesien, hal ini sejalan dengan fungsi Pembinaan, dan posisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pasal dan ketentuan yang ada didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

E. Konsep Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu bentuk sektor informal diartikan sebagai setiap orang yang melakukan kegiatan perdagangan, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Masim Riau

dilakukan secara berpindah-pindah dengan modal terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum dengan tidak mempunyai legalitas formal.⁴² Dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kultur yang dimiliki atau dilakukan secara individual.⁴³

Sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataan dari masing-masing kota. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemugaran atau relokasi

Tindakan dengan pemugaran suatu lokasi baik berupa pembangunan baru dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari kondisi yang telah ada. Tindakan ini sebaiknya juga memperhatikan kepentingan dari pihak Pedagang Kaki Lima sendiri dengan tidak mengganggu perolehan atau hubungannya dengan konsumen maka tindakan tersebut dapat diterima.

2. Stabilisasi atau pengaturan berupa penataan fisik atau penempatan lokasi Pedagang Kaki Lima

Pada suatu lokasi. Adapun beberapa alternatif tindakan yang dilakukan antara lain; Peruntukan dalam ruang terbuka (*Open Market*), dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan Pedagang Kaki Lima ini dan diharapkan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan lokasi Pedagang Kaki Lima. Pembebasan atau penutupan

⁴² Juniardi, *Pedagang Kaki Lima dan Keuntungan Daerah*, (Malindo Press, Bandung:2009), h.24

⁴³ Mustafa, *Pengembangan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta, Media Press:2015), h.23

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan-jalan tertentu, dan menutup sirkulasi lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor yang hanya diperuntukkan bagi pergerakan pejalan kaki. Tindakan ini biasanya bersifat temporer yaitu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja. Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar, menempatkan Pedagang Kaki Lima pada jalan-jalan atau sebagian trotoar tertentu pada waktu tertentu yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya. Setelah itu, Pedagang Kaki Lima tersebut wajib membersihkan ruang usahanya agar tidak mengganggu fungsi kota lainnya.

3. Pemindahan atau removal

Dengan cara memindahkan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian dan kajian yang komprehensif sehingga memberi solusi yang berkesinambungan.

4. Pengelolaan struktural

Pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil. Selain bentuk pengelolaan lokasional, pemerintah kota mencoba pola pengelolaan struktural. Adapun yang termasuk dalam pengelolaan struktural adalah perijinan, pembinaan, dan bantuan atau pinjaman. Perijinan usaha kepada kelompok Pedagang Kaki Lima didasari menurut jenis barang atau jasa yang ditawarkan, waktu usaha dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivitas Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah serta membantu dalam penarikan retribusi.⁴⁴

⁴⁴ Efendi, *Konsep Pengelolaan Penempatan Pedagang Kaki Lima Perkotaan*, (Aksara, Bandung:2014)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum tercapai secara maksimal dalam hal sosialisasi yang lebih efektif dan efisien, dan juga harus segera merancang untuk Kecamatan Bina Widya dimana lokasi untuk diletakkan para Pedagang Kaki Lima ini melakukan aktivitas jual beli.
2. Faktor Penghambat yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan tingginya angka kenaikan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan kesulitan untuk menempatkan lokasi pedagang berjualan yang menyebabkan terhambatnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



B. Saran

Berdasarkan Uraian yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis memberikan saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus lebih mengoptimalkan tugasnya dalam hal Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru akan tertata dan menjadi lebih baik pengelolaan kedepannya tercapai.
2. Bagi pihak Pedagang Kaki Lima, agar dapat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru agar terkelola dan Pedagang Kaki Lima dapat menjadi salah satu simbol ikonik di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amu Samah, *Kajian-kajian dan praktek dalam penelitian hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)
- _____, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013)
- C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- D.A Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Universitas Parahiayang, Bandung)
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, PT Raja Grafindo Persada: 2014
- Efendi, *Konsep Pengelolaan Penempatan Pedagang Kaki Lima Perkotaan*, Aksara, Bandung: 2014
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009
- Juniardi, *Pedagang Kaki Lima dan Keuntungan Daerah*, Malindo Press, Bandung: 2009
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Lisa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Kalimedia, 2017.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung: 1976
- Mustafa, *Pengembangan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima*, Jakarta, Media Press: 2015, h.23
- Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafindo Persada, 1983.

Triwik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi pustaka, 2010

Umarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, 2008

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika:2014

B. Jurnal

Azhan Thamrin, Dikutip dari Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik hukum dan islam, *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019

Ahmad Sutrisno, Dikutip dari Jurnal Hukum Legal Opinion *Kebijakan Politik Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, edisi 1, Vol 2, 2014.

Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012

Jurnal JOM FISIP *Profil Pedagang Kaki Lima Lansia di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, vol.4 NO.2 Oktober 2017

M Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018

Rizlia Aisyah Haris, Elsyah Muzayyana, Irma Irawati, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNMER, Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Ekonomi Lokal di Kabupaten Sumenep*, Vol: 4, No: 2, 2019.

C. Internet

Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1>

diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB

D. Peraturan Perundangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Kantor Kecamatan Bina Widya

DOKUMENTASI



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

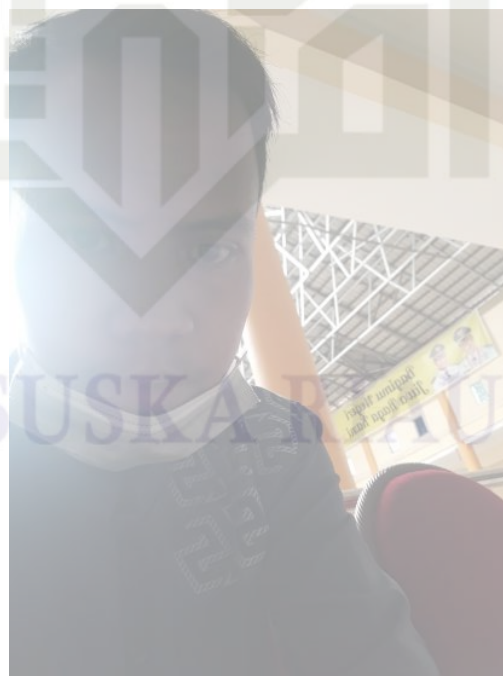


Foto Bersama Kasi Retribusi DAGTRI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Staff Bidang Pasar Dagtri Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Kabid Pasar, Bapak Hendra Putra



Foto Bersama Pedagang Kaki Lima, Ibu Nur Elmi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Foto Bersama Pedagang Kaki Lima,



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Pedagang Kaki Lima



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Pedagang Kaki Lima



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh:

Nama : **BAMBANG WIRANTO**
 NIM : 11727101944
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : ONLINE

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Dr. Masir, SHL, MH

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, SHL, MH

Penguji II
Dr. Mahmuzar, M.Hum

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jahirus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

(Signatures of the Exam Panel Members)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un 04/F.I/PP.00.9/2907/2021

Pekanbaru, 12 Maret 2021

Bia
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: BAMBANG WIRANTO
NIM	: 11727101944
Jurusan	: Ilmu Hukum SI
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarah mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39711
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 01.01.01/PP.019/2907/2021 Tanggal 12 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : BAMBANG WIRANTO |
| 2. NIK / KTP | : 11727101944 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

1. Dikirimkan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kabarevkesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Berkepentingan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1102/2021

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39711 tanggal 17 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

BAMBANG WIRANTO

11727101944

SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

ILMU HUKUM

S1

KAMPUNG I JORONG MAHAKARYA DESA KOTO BARU KEC. LUHAK NAN DUO KAB. PASAMAN BARAT-SUMATERA BARAT

PELAKSANAAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Jarak Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Bersikap sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menimbang

Nama
NIM
Fakultas
Jurusan
Jenjang
Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Jarak Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Bersikap sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

embusan

- th : 1. Dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Sebagai pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: **BAMBANG WIRANTO**

: **11727101944**

Program Studi: **ILMU HUKUM**

Judul : *Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru*

Pembimbing : **Basir, SHL., M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

A. Pimpinan Redaksi



M. Alif Syahrin, SHL., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



BAMBANG WIRANTO, lahir di Mahakarya, 14 Februari 1998. Anak ke 3, dari pasangan Drs. Jumono dan Sri Widayati, S.Pd, SD Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 14 Luhak Nan Duo, Kecamatan Luhak Nan Duo lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Luhak Nan Duo lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Luhak Nan Duo.

Kemudian pada tahun 2017 juga melanjutkan studi ke Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan PKL di Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada bulan July pada tahun yang sama penulis melaksanakan KKN di Desa Mahakarya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan penulis melakukan penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul "Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, yang di bimbing oleh Basir, S.Hi., MH, Alhamdulillah, pada tanggal 27 Juli 2021 akhirnya penulis telah menyelesaikan studi dengan predikat *Sangat Memuaskan* dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU